



## Kamaruzaman Targetkan APBD Rp1,7T



ANTARA/RIZKI FADRIANI

**HUT KUBU RAYA:** Pj Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kubu berserta para jajarannya pada momen HUT ke -17 Kubu Raya di Sungai Raya.

**SUNGAI RAYA** - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat targetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 dapat terealisasi 100 persen dengan nilai sebesar

Rp1,7 triliun. "Target untuk Kubu Raya ada Rp1,7 triliun dan mudah-mudahan ini bisa terealisasi," ujar Pj Bupati Kubu Raya, Sy Kamaruzaman di Sungai Raya, Selasa (13/8).

Kamaruzaman mengatakan dalam realisasi APBD tersebut pihaknya fokus ke persoalan inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang





Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----

2024

Hal.: 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

dapat membangun Kubu Raya lebih baik ke depannya. "Karena kita fokus dengan persoalan inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem agar mendapatkan porsi dalam anggaran ini," ucapnya.

Ia mengatakan hal tersebut bertujuan untuk menyatakan bahwa SDM dan pembangunan Kubu Raya benar-benar tersentuh serta benar mengarah ke kepentingan masyarakat. Kamaruzzaman pun menegaskan dalam realisasi tersebut pihaknya memerlukan penyusunan kegiatan yang 100 persen berpihak ke kepentingan masyarakat, sehingga menciptakan Kubu Raya yang lebih baik.

"Kita berharap seluruh kegiatan yang disusun nanti adalah kegiatan yang betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat," tuturnya. Sebelumnya Kamaruzaman mengatakan jika pada 2023 lalu belanja daerahnya terealisasi Rp1,54 triliun atau 86,10 persen dari anggaran Rp1,79 triliun, sehingga belum maksimal. Dan untuk memaksimalkan anggaran yang ada maka diperlukan perubahan anggaran mengingat adanya dinamika dan perkembangan situasi yang terjadi selama masa penganggaran tahun 2024, baik dalam hal penerimaan keuangan daerah maupun faktor lainnya. "Sehingga memang APBD itu harus dilakukan perubahan dalam konteks penataan belanja-belanja daerah," ucapnya. *(ant)*